

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- A.P.Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung.
- Aartje Tehupeior, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012 *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia, Jilid 2*, Prestasi Pustaka karya, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar.
- B.F.Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, Tbk.
- Bachtiar Efendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni Bandung.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta.

Chandra, S., 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Grasindo, Jakarta.

Darji Darmodiharjo, 1996, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Henry Campbell Black, Black's Law Doctionary, dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka , Jakarta, 1995.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana.

M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muchsin dkk, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

R. Raharjo, 2008, *Himpunan Istilah Pertanahan dan Yang Terkait*, Jakarta, Penerbit Djembatan.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Salim HS. dan Erlis Septiana Nurbani , 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Samun Ismail, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soedewi Maschun Syofwan, 2005, *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, Karunika.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Supriyadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah*, Kencana, Jakarta.
- Urip Santoso, 2011, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung, Universitas Parahiyangan, 2000.
- Adek Chandra, Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2 Mei 2022.

Denik Puspita, Problematika Penerapan Asas Terjangkau Dalam Pendaftaran Tanah, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pena Justisia*, Vol.18, No.2.

Desi Apriana, Arifin Burb, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2021.

Dian Aries Mujiburohman Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Bhumi*, Vol. 4 No. 1, Mei 2018.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2011.

Husen Alting, Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Pemilikan Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, *Risalah Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2010.

Isdiyana Kusuma Ayu, Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Legality*, Vol. 27, No. 1, Maret 2019-Agustus 2019.

M Alvi Syahrin, “Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa”, *Law Institute of MAS*, Vol.4 No.2 Tahun 2019.

Monik Ajeng Puspitoarum D.W, Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.4 No.4 ,Oktober-Desember 2016.

Muhammad Andhika,Ummar Ma’ruf,” Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah”, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 28 Oktober 2020.

Nizam Zakka Arrizal, Siska Diana Sari, Surat Keterangan Tanah: Keabsahan, Penggunaan Dan Kelemahan Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun, Vol. 5, No. 2 Desember 2022.

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

Prama Widyanugraha, “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No.2, Maret 2019.

Rahmad Masturi, Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional , *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20 No. 2 November 2018.

R. Agus Abikusna, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal SOSFILKOM*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. XIII No. 01, Januari-Juni 2019.

Reda Manthovani, Istiqomah Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum, *Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017.

Setiyo Utomo, Problematika Proses Pengadaan Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan pranata social*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Sinta 4, vol 5, No. 2, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konvens Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Kebijakan selanjutnya;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Bersama Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK/06/2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak *Rismawardi, S. Pd.*, Wakil Kepala Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang Bidang Sarana dan Prasarana, bertempat di Bukit Surungan.

Wawancara dengan Ibu *Rika Mulia Sari, SH.*, di Kantor BPN Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara Prapenelitian dengan Bapak Drs. Masri.

Wawancara dengan Bapak Suharmen, SH., Notaris di Kota Padang Panjang.

Wawancara dengan Bapak Halim Operator Barang Milik Negara Man 2 Kota Padang Panjang di MAN 2 Kota Padang Panjang.

E. Website

Pengelolaan Barang Milik Negara (State Property Management) disusun oleh Pokja peraturan Pemerintah Pengelolaan BMN/D Pada KPMK, <http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong/baca-artikel/13579/Pengelolaan-Aset-DJKN-dengan-Privatisasi.html>

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>